

Ketika Bintang-Beringin Pecah Kongsi

Oleh Gatut Priyowidodo *

DI Kuala Lumpur, orang seolah berjejal ingin menghirup panorama BB. Lalu lajang wisatawan dari segala penjuru hilir-mudik di kawasan itu sekadar untuk berbelanja atau menikmati kecantikan kota saat malam sembari menikmati wisata kuliner kelas rakyat yang serbamuah.

BB atau Bukit Bintang adalah area pemersatu. Tapi, di Indonesia justru sebaliknya. BB yang akronim Bintang Tiga Sudut (Demokrat) dan Beringin (Golkar) yang diharapkan banyak orang menjadi case kesuksesan menuju persatuan Indonesia yang semakin kukuh itu terancam buyar.

Renantas bisa dipecah karena kepentingan politik mereka yang tidak sehaluan lagi atau karena sejak awal memang desain kongsi mereka rapuh. Itulah yang menyebabkan hari-hari ini peta politik nasional begitu melumer. Pangung politik tidak hanya diisi oleh dua dedengkot politik yang sudah sesumbar maju, yakni Mega dan SBY. Namun, Jumat (20/2), Kalla yang selama ini agak enggan mengekspresikan obsesinya berani berkata siap untuk dicapreskan.

Menarik dicermati, benarkah langkah Kalla itu murni dari kepentingan internal Golkar atau sekadar reaksi emosional yang merasa dilecehkan Ahmad Mu-barok, wakil ketua umum DPP Partai Demokrat, yang mengestimasi perolehan partai berimbang beringin pada Pemilu 2009 ini tinggal 2,5 persen saja?

Menjawab Ketidakpastian

Baiklah, kita coba memahami dari perspektif teori organisasi. Menurut Clampritt dan William (2004), tantangan terbesar seorang pemimpin adalah jika organisasinya mengalami ketidakpastian. Ketidakpastian tersebut bisa dipicu dari dua poros, yakni konflik internal yang inheren maupun ulah dari lingkungan sekitar yang berusaha memancing kekeruhan.

Keteguhan Kalla untuk sama-sama hingga periode pemerintahannya

berakhir 20 Oktober nanti terancam kandas. Sekali pun berkali-kali ditegaskan bahwa secara personal relasi dirinya dengan SBY baik, tetap saja itu tak bisa mengobati luka psikologis yang sengaja disayatkan ke sembilu.

Partai besar sekelas Golkar tentu punya harga diri dan kredibilitas. Orang bisa mengkritik, mencera, meledek, menafikan, bahkan memecahkan oknum secara personal. Namun, jika sudah menyangkut kepentingan institusional, respons yang berkembang sudah menjadi lain.

Institusi adalah representasi kepentingan kolektif. Karena itu, menurut Englehardt (2003), institusi disebut sebagai sebuah asosiasi yang berperilaku. Karena penggambaran yang bersifat organik tersebut bisa saja ia sangat sensitif terhadap perubahan masa sebelum (anterior) hingga setelahnya (posterior) sehingga ditentukan kondisi psikologis dan kepentingan-kepentingan, baik yang bersifat pragmatis atau strategis.

Dalam konteks demikian, segera kita bisa mengēja ke mana arah angin yang sengaja ditupkan melalui insiden Mu-barok itu. Secara organisatoris, justru fungsionaris beringin wajib hukurnya berterima kasih kepada Mu-barok. Dia menjadi katalisator kepepatan arus bawah untuk mengegaskan jati diri sebagai the real ruling party. Hanya terkait etika bertata krama politik yang santun, Kalla sebagai orang nomor satu PG tidak mau keblinger nafsu kekuasaan.

Dia menyadari betul bahwa ketika kontestasi kepresidenan berlangsung pada 2004, calon Golkar bukan dirinya, tapi Wiranto. Kalaupun tidak berpasangan dengan SBY dan kemudian tidak menjadi Wapres, belum tentu juga pada Munasub Golkar di Bali, tokoh dikelas Akbar Tandjung berhasil dikalahkan. Dugaan yang sama muncul ke permukaan ketika nanti Kalla tidak

terpilih sebagai presiden atau wakil presiden. Siapa pun kader terbaik Golkar yang dibutuhkan berlagu di pilpres dan menang, dia pasti akan didorong untuk pula memegang kendali PG dengan segala plus-minusnya.

Apa pun kemungkinannya itu bisa saja terjadi. Tapi, urusan hari ini adalah se-laku pimpinan partai, Kalla harus bertindak responsif untuk memberi kepastian kepada organisasinya. Upaya memelihara jeda tanpa kepastian ibarat meletakkan diri. Itulah yang sekarang ingin dinegasikan. Relasi personal boleh saja tegaja. Namun, hubungan kelembagaan tetap prioritas utama.

Perjalanan empat setengah tahun mengawal pemerintahan SBY-Kalla, koalisi Demokrat-Golkar memang mengalami pasang surut. Kulminasi ketika Golkar menah di Mahkamah Per-menteri yang harus berhadapan dengan derasnya usul DPR tentang angket BBM. Begitu pula dengan ditolaknya Agus Martowardojo dan Raden Pardede sebagai calon gubernur BI hanya karena contoh dukungan kekuatan politik parlemen amat penting bagi presiden terpilih.

Masih Ada Jalan

Opsi terbaik, dua pimpinan negara harus menahan diri, jantik, sementara waktu. Sekalipun sulit. Mengobati ketidakpastian hanya mujarab jika dijawab dengan tawaran konkret. Senada dengan Clampritt dan William, pilihannya adalah meyakinkan level di daerah atau alkar rumput dengan teknik serta strategi berkomunikasi yang andal.

Sekarangnya ada empat kemungkinan strategi. Pertama, melihat bahwa percapesan Kalla hanyalah move politik. Itu masuk akal. Sebab, bagi Kalla yang berlatar belakang saudagar, menaikkan dan menurunkan harga adalah hal yang biasa. Tak sulit bagi dia untuk aksi banting harga, tapi akan taking profit di

belakang. Sekaligus upaya mereduksi kemarahan agar ada kejelasan sikap serta menjaga kredibilitas partai.

Kedua, meminimalkan secara seksama respons publik. Sebagai pemimpin non-Jawa, tentu dia amat memperhatikan kultur politik mayoritas. Pemilihan yang lebih dari 60 persen Jawa sangat mahal harganya, jika dipertahankan tanpa perhitungan.

Bisa jadi mengkomodifikasi kepentingan mereka, komposisi calon Golkar akan bergerak ke bandul Sultan HB X-Kalla. Pilihan logis sekalipun Sultan sudah dicalonkan Partai Republikan. Tapi, dia pun kader Golkar. Itu jelas memfragmentasi komposisi dominasi mitos suara Jawa dari dua blok menjadi tiga, yakni blok Mega, blok SBY, dan blok SHB.

Ketiga, uji nyali. Yakni, menantang untuk tampil sebagai calon RI-1 sambil menggandeng tokoh Jawa dari partai kelas menengah. Mencoba peruntungan khas pedagang pasar. Bahwa itu berisiko, soal yang tak patut dipersoalkan. Dua kemungkinan, meraih jabatan itu atau lenyapnya kesempatan. Setidaknya, sejarah telah mencatat ada capres non-Jawa yang berani bertarung melawan hegemoni budaya Jawa.

Keempat, pilihan yang relatif kecil dipilih, namun bisa jadi sebagai alternatif. Sebab, penentuan capres Golkar tetap menunggu pemilih legislatif dan mengacu keputusan Rapimnas 2007 yang harus memunculkan satu di antara tujuh nama yang terjaring. Maka, jika dia tidak diusulkan, skenarionya harus mampu bertindak sebagai sutradara di belakang layar.

Tentu saja, di antara empat strategi memainkan peran tersebut, Kalla pasti memilih pada koridor "safety player". Dia tidak bakal tergesa-gesa mengambil keputusan final. Kuncinya terletak pada ke mana arah pendulum memantul. Kesana ia bergerak.

* Gatut Priyowidodo, dosen Jurusan Ilmu Komunikasi dan kepala PKKP (Pusat Kajian Komunikasi Petra) UK Petra Surabaya